



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : BAYU JOKO MULYONO
- Jabatan** : KEPALA DINAS
- NHK** : 489193

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.655.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/260 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 1.380.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, HONDA D1A02M18M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.408.576
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.734.908.576
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.734.908.576

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ERMI ASRIATI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **489093**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	240.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 240.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	57.000.000
1. MOTOR, SM SPORT SM CLASSIC/SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
2. MOTOR, HONDA T4G02T31LO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.248.227
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	309.248.227
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	309.248.227

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI HARTATIK
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 712025

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	550.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , LAINNYA Rp. 550.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	70.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU AYLA 1.0 MMT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.903
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	676.912.903
III. HUTANG	Rp.	340.166.110
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	336.746.793

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI WISNU HATMANA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 761026

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 540.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 234.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.139.910

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 776.139.910

III. HUTANG Rp. 78.876.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 697.263.310

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.